

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tantangan pemberdayaan Pokdarwis Payung Kuning dalam mengelola program CSR Taman Wisata Laut Labuhan yang ditemukan dari dinamika dan proses pemberdayaan yang telah dilalui. Program CSR dalam penelitian ini merupakan pengembangan program dari program CSR yang sudah berhenti sebelumnya, yaitu TPM, karena mengalami konflik dan tantangan pemberdayaan akibat proses pemberdayaan yang instan. Kedua program ini diimplementasikan di desa yang sama, yaitu Desa Labuhan. Kedua program merupakan program CSR berupa konservasi pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dinamika, proses, dan tantangan pemberdayaan Pokdarwis Payung Kuning dalam mengelola program CSR Taman Wisata Laut Labuhan. Penelitian ini menggunakan teori pengorganisasian masyarakat dari McKnight & Plummer. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling* dibantu dengan *snowball sampling* yang melibatkan 16 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Pokdarwis Payung Kuning dalam mengelola program CSR Taman Wisata Laut Labuhan belum optimal karena dinamika dan proses pemberdayaan yang berlangsung menghadirkan tantangan baru bagi Pokdarwis Payung Kuning. Dari segi kesadaran, pola pikir anggota pokdarwis yang masih pragmatis membuat Sahril sebagai ketua pokdarwis bekerja secara individu dalam pengelolaan program. Dari segi partisipasi, masih didominasi oleh elit aktor lokal yang menghambat proses memberdayakan anggota yang lain. Dari segi peningkatan kapasitas, terdapat hambatan kurangnya dukungan *stakeholders* dari pemerintah tingkat kabupaten dan tidak didukung oleh integrasi aktor yang baik antara pemerintah tingkat kabupaten dan PHE WMO. Selain itu, faktor desentralisasi dari perusahaan dan pemerintah yang menyerahkan wewenang pengelolaan program kepada salah satu aktor yang dipercaya, yaitu Sahril, sehingga Sahril mengalami rangkap jabatan dan terlihat mendominasi dalam pengelolaan program CSR. Pokdarwis Payung Kuning merupakan kelompok yang berdaya karena peran Sahril, tanpa adanya mobilisasi dari Sahril, Pokdarwis Payung Kuning menjadi tidak berdaya. Selain itu, pada proses pemberdayaan, peningkatan kapasitas tidak membuat anggota Pokdarwis mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan kelompok, sehingga pemberdayaan Pokdarwis Payung Kuning bukan bersifat kelompok atau komunitas, melainkan masih bersifat pemberdayaan individu.

Kata kunci: Pengorganisasian Masyarakat, Pemberdayaan, Kelompok Penerima Manfaat, Tantangan Pemberdayaan

ABSTRACT

This research discusses the empowerment challenges of Pokdarwis Payung Kuning in managing Taman Wisata Laut Labuhan's CSR program, which were found from the dynamics and empowerment process that has been passed. The CSR program in this study is a development of a previously discontinued CSR program, TPM, due to conflicts and empowerment challenges caused by the instant empowerment process. Both programs were implemented in the same village, Desa Labuhan. Both programs are CSR programs in the form of coastal conservation based on community empowerment.

This research aims to find the dynamics, processes, and challenges of empowering Pokdarwis Payung Kuning in managing Taman Wisata Laut Labuhan program. This research uses McKnight & Plummer's theory of community organizing. This research method uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling technique assisted by snowball sampling involving 16 informants. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity techniques were tested using the triangulation method.

The results showed that the empowerment of Pokdarwis Payung Kuning in managing Taman Wisata Laut Labuhan's CSR program was not optimal because the dynamics and empowerment process that took place presented new challenges for Pokdarwis Payung Kuning. In terms of awareness, the mindset of Pokdarwis members who are still pragmatic makes Sahril as the head of Pokdarwis work individually in program management. In terms of participation, it is still dominated by local elite actors, which hinders the process of empowering other members. In terms of capacity building, there is a lack of stakeholders support from the district-level government and not supported by good actor integration between the district-level government and PHE WMO. In addition, the decentralisation factor of the company and government, which handed over the authority to manage the program to one trusted actor, Sahril, meant that Sahril held multiple positions and appeared to dominate the management of the CSR program. Pokdarwis Payung Kuning is an empowered group because of Sahril's role, without Sahril's mobilization, Pokdarwis Payung Kuning would not be empowered. In addition, in the empowerment process, capacity building does not allow Pokdarwis members to gain control over group decision-making, so the empowerment of Pokdarwis Payung Kuning is not group or community in nature, but is still individual empowerment.

Keywords: *Community Organizing, Empowerment, Empowerment Challenges, Beneficiary Groups*